

## RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan dalam implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga mulai dari pembatasan komoditas tanaman dan jenis pupuk bersubsidi, ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani, hingga pada penyelewengan harga jual pupuk bersubsidi di KPL yang lebih tinggi dari HET. Kebijakan Subsidi Pupuk bertujuan membantu meningkatkan daya beli petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau dan jumlah yang mencukupi sesuai dosis yang dianjurkan serta untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian nasional. Persoalan yang terjadi dalam implementasinya tentu akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjelaskan faktor-faktor penting dalam implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk bagi petani di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan model implementasi integratif menurut Soren C. Winter (2004) yang terdiri dari tiga faktor utama yaitu perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah, dan perilaku kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan menggunakan kombinasi teknik purposive dan snowball sampling. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam melakukan analisis data, serta melakukan uji validitas data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga belum berjalan optimal. Faktor perilaku organisasi dan antar organisasi menunjukkan bahwa komitmen yang ada belum sepenuhnya dijadikan pedoman utama. Ini terlihat dari pupuk bersubsidi yang dijual di atas HET. Sementara itu, meskipun koordinasi antar pelaksana terjalin dengan baik, namun koordinasi PPL Kecamatan Rembang dengan KPL dan wilayah binaan mengalami kendala karena kegiatan verifikasi lapangan yang tidak rutin dan banyaknya kelompok tani yang tidak aktif. Kemudian, ditinjau dari faktor perilaku birokrasi level bawah menunjukkan bahwa diskresi telah dijalankan dengan baik terutama terkait kriteria penerima pupuk. Namun untuk dimensi komunikasi belum terjalin dengan baik karena ketidakaktifan kelompok tani. Sementara itu, ditinjau dari faktor perilaku kelompok sasaran menunjukkan bahwa respon positif petani timbul karena manfaat kebijakan yang dirasakan. Meskipun begitu, respon negatif yang tinggi juga diberikan petani atas berbagai persoalan Kebijakan Subsidi Pupuk. Respon negatif juga diperparah karena adanya misinterpretasi petani dalam memahami Kebijakan Subsidi Pupuk.

Kata Kunci: implementasi kebijakan publik, perilaku organisasi, birokrasi level bawah, kelompok sasaran.

## SUMMARY

This research was motivated by some problems in the implementation of the Fertilizer Subsidy Policy in Rembang District, Purbalingga Regency, ranging from restrictions on crop commodities and types of subsidized fertilizers, imbalances between the amount of needs and allocations of subsidized fertilizers received by farmers, to the misappropriation of the selling price of subsidized fertilizers in KPL which is higher than HET. The Fertilizer Subsidy Policy aims to help increase the purchasing power of farmers to obtain fertilizer at affordable prices and sufficient quantities according to the recommended dose and to encourage an increase in national agricultural productivity. Problems that occur in its implementation will certainly hinder the achievement of these policy objectives. Therefore, this study wants to explain important factors in the implementation of the Fertilizer Subsidy Policy for farmers in Rembang District, Purbalingga Regency.

This study uses an integrative implementation model according to Soren C. Winter (2004) which consists of three main factors, namely organizational and interorganizational behavior, lower-level bureaucratic behavior, and target group behavior. The research method used is a descriptive qualitative research method with informant selection techniques using a combination of purposive techniques and snowball sampling. Data sources in this study are primary data sources and secondary data with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Researchers use interactive models according to Miles, Huberman, and Saldana (2014) in conducting data analysis, as well as testing data validity using triangulation.

The results of this study concluded that the implementation of the Fertilizer Subsidy Policy in Rembang District, Purbalingga Regency has not run optimally. Factors of organizational and interorganizational behavior show that existing commitments have not been fully used as the main guideline. This can be seen from subsidized fertilizers sold above HET. Meanwhile, although coordination between implementers is well established, the coordination of PPL Rembang District with KPL and target areas has experienced problems due to irregular field verification activities and many inactive farmer groups. Then, judging from the lower-level bureaucratic behavior factors, it shows that discretion has been carried out well, especially related to the criteria for fertilizer recipients. However, the communication dimension has not been well established due to the inactivity of farmer groups. Meanwhile, judging from the behavioral factors of the target group, it shows that the positive response of farmers arises because of the perceived policy benefits. However, high negative responses were also given by farmers on various issues of Fertilizer Subsidy Policy. The negative response was also exacerbated due to farmers' misinterpretation in understanding the Fertilizer Subsidy Policy.

Keywords: public policy implementation, organizational behavior, lower-level bureaucracy, target group.